



Volume 10, Nomor 1, Juni 2025, 49-70
ISSN 2407-4292 (Print), ISSN 2721-6780 (Online)
Doi: <https://doi.org/10.33701/j-3p.v10i1.4618>
Available Online: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jpdpp>

DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING: ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBERHASILANNYA DI KABUPATEN MAJENE

M. Alif Alwan Sadek¹, Mutia Rahmah^{2*}, Muchlis Hamdi³

²Studi Kebijakan Publik, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363, Indonesia; email: mutiarahmah@ipdn.ac.id

*Correspondence

Received: 02-08-2025; Accepted: 04-11-2025; Published: 11-11-2025

Abstrak: Percepatan penurunan stunting menjadi prioritas dalam penyelesaian masalah yang saat ini menjadi isu global dan program prioritas nasional. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut telah dilakukan, mulai dari pelaksanaan kebijakan pusat hingga kebijakan daerah. Namun, kondisi yang ada menunjukkan perkembangan prevalensi stunting masih belum sesuai harapan dan bahkan jauh di atas target yang ditetapkan. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengkaji penentu keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Majene. Metode kualitatif dalam studi ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data melalui wawancara dari berbagai informan pemerintah dan non pemerintah, serta penggunaan data sekunder, dan triangulasi dari keduanya. Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan penyederhanaan, penyajian, dan interpretasi data. Temuan studi ini mengungkapkan bahwa penentu keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting terdiri atas ketersediaan subsidi; kejelasan prosedur, kecukupan sumber daya dan penentuan target yang faktual; optimalitas pengawasan; intensitas koordinasi organisasi yang terlibat dalam forum formal dan informal; ketepatan pemanfaatan sumber daya; kejelasan kemanfaatan program bagi masyarakat. Ke depan, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang melibatkan semua aktor dan evaluasi secara berkala mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, kebijakan kependudukan, masalah kompleks, penurunan stunting.

Abstract: Accelerating stunting reduction is a priority in solving problems that are currently a global issue and a national priority program. Various efforts have been made to solve the problem, ranging from the implementation of central policies to regional policies. However, existing conditions show that the development of stunting prevalence is still not as expected and even far above the set target. Therefore, the purpose of this study is to examine the determinants of the success of the implementation of stunting management policies in Majene Regency. The qualitative method in this study was carried out in the context of data collection through interviews from various government and non-government informants, as well as the use of secondary data, and triangulation of both. Data analysis is carried out after data collection is then continued with simplification, presentation, and interpretation of data. The findings of this study reveal that the determinant of the success of the implementation of stunting reduction policies consists of the availability of subsidies; clarity of procedures, adequacy of resources and factual

determination of targets; optimal supervision; the intensity of organizational coordination involved in formal and informal forums; the accuracy of resource utilization; clarity of the benefits of the program for the community. In the future, it is necessary to consider in the preparation and implementation of programs involving all actors and periodic evaluations of the implementation of stunting handling policies.

Keywords: *policy implementation, population policy, complex problems, stunting reduction.*

I. Pendahuluan

Stunting merupakan isu global yang berimplikasi pada kondisi pembangunan manusia ke depan yang saat ini masih berlangsung sebagai program prioritas nasional (Sitorus, 2024). Stunting mengacu pada kondisi tinggi badan anak antara 0-59 bulan di bawah minus dua standar deviasi dan di bawah rata-rata standar pertumbuhan anak (WHO, 2015). Perkembangan prevalensi stunting di Indonesia masih di atas target yang awalnya ditetapkan kurang dari 14% di tahun 2024 (Setkab, 2023). Kenyataannya, prevalensi stunting masih berada pada 19,8% pada tahun tersebut (Setneg, 2025). Bahkan, dalam 17 tahun terakhir, sejak 2007 hingga 2024, penurunan hanya sebesar 17% (Kemenkes, 2021, 2022, 2023). Artinya bahwa penurunan prevalensi stunting secara nasional hanya sebesar 1% setiap tahunnya.

Stunting tidak hanya berdampak pada jangka pendek tapi juga jangka panjang. Dampak jangka pendek, balita yang mengalami stunting dapat mengalami gangguan keterampilan motorik dan verbal yang menghambat perkembangan (Maya, 2023; Sunarni et al., 2022). Selain itu, akan lebih rentan terhadap penyakit akut, yang dapat memperburuk siklus kekurangan gizi dan penurunan kesehatan (Metasari et al., 2024; Mustika et al., 2022). Konsekuensi jangka panjang, stunting bahkan menimbulkan tantangan yang lebih kompleks, di antaranya masalah kesehatan kronis saat dewasa (Ekayanthi & Suryani, 2019; Kurniati et al., 2023), produktivitas ekonomi yang terbatas, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan pada akhirnya berdampak pada pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Osendarp et al., 2021; Wand et al., 2024).

Penanganan stunting tidak hanya dapat diselesaikan berkaitan dengan sektor kesehatan namun juga multi sektor. Kenyataan ini tampak ketika kebijakan penanganan stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengatur adanya intervensi spesifik dan sensitif. Dalam konteks spesifik, penanganan stunting dari sisi kesehatan dan gizi, meliputi penyediaan suplementasi mikronutrien dan praktik diet yang lebih baik untuk ibu dan anak selama 1.000 hari pertama kehidupan yang kritis (Elisaria et al., 2021; Widhiastuti et al., 2021). Intervensi sensitif, penanganan stunting di luar sektor kesehatan, lebih luas dan mencakup praktik hidup sehat, akses

ke air bersih, sanitasi, dan edukasi tentang gizi, sehingga mampu mengatasi akar penyebab stunting (Bhutta et al., 2020; Nugroho et al., 2023; Syafrawati et al., 2023).

Perkembangan prevalensi stunting secara nasional yang masih di atas target menjadi gambaran penanganan stunting di tingkat lokal. Provinsi NTT menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (Kemenkes, 2021, 2022). Meskipun prevalensi tertinggi, NTT mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022, yakni dari 37,8% menjadi 35,3%. Berbeda dengan Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan prevalensi stunting dari tahun 2021 ke 2022, yakni 33,8% menjadi 35,0% (Kemenkes, 2022). Tahun 2023, penurunan menjadi 30,3% namun kembali meningkat di tahun 2024, yakni mencapai 35,4% (Ali, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika perkembangan stunting di Provinsi Sulawesi Barat sangat cepat.

Dilihat dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, prevalensi stunting tertinggi tahun 2022 sebesar 40,6% berada di Kabupaten Majene (Kemenkes, 2023). Pada tahun 2023, prevalensi stunting menurun hingga 35,4% namun kembali meningkat hingga 36,47% pada Juni 2024 (Taufik, 2024). Sebagai upaya penanganan masalah stunting, Pemerintah Kabupaten Majene telah mengatur tentang intervensi yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah stunting melalui penurunan stunting terintegrasi. Tujuan kebijakan ini adalah bagaimana angka stunting dapat menurun dengan cepat. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum mencapai tujuan atau dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Majene belum efektif mencapai tujuan. Hal ini tampak ketika prevalensi stunting mengalami fluktuasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Implementasi merupakan sebuah tindakan mengubah tujuan menjadi hasil kebijakan (Hamdi, 2014). Telah banyak studi terdahulu mengenai stunting yang dilihat dari kesehatan (Ariantjelangi, 2020; Nababan, 2015; Rahmawati et al., 2023) maupun bidang lainnya (Candarmaweni & Rahayu, 2020; Hisanuddin et al., 2023). Dalam konteks kebijakan, berbagai penelitian telah banyak meneliti tentang implementasi kebijakan penanganan stunting di tingkat lokal (Indriyani et al., 2022; Mustafidah et al., 2024; Nugroho, 2023; Taofik et al., 2024).

Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun banyak kebijakan dan program telah diimplementasikan, hasil yang dicapai masih belum optimal. Pernyataan tersebut tampak dari studi evaluasi kebijakan pencegahan stunting yang mencatat bahwa faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya distribusi tenaga kesehatan berkontribusi pada implementasi yang tidak

efektif (Milwan & Sunarya, 2023; Sari & Yusran, 2022). Upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis telah dirumuskan untuk mengurangi angka stunting dan mendukung generasi emas 2045 (Melisa et al., 2022). Namun, meskipun telah banyak inisiatif, angka stunting yang diharapkan masih jauh dari target yang ditetapkan, dan kondisi ini menimbulkan permasalahan serius dalam implementasi kebijakan yang ada (Saputri & Tumangger, 2019).

Ketika kondisi di lapangan menunjukkan tujuan yang belum tercapai, maka gambaran tersebut juga mencerminkan implementasi yang belum optimal. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan studi ini adalah untuk mengkaji penentu keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Majene. Selanjutnya, akan dibahas mengenai tinjauan pustaka berkaitan dengan makna implementasi kebijakan dan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan dari berbagai studi terdahulu, metode yang digunakan, hasil dan pembahasan serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi ke depan.

II. Kajian Pustaka

Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dari kebijakan sangat tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Implementasi kebijakan ini menjadi salah satu proses kebijakan publik yang paling krusial dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah dirumuskan dan efektivitas kebijakan tersebut. Studi oleh Onyango menekankan pentingnya visibilitas kebijakan dalam proses implementasi yang efektif (Onyango, 2022). Mazmanian dan Paul menyoroti bahwa implementasi kebijakan tidak hanya tergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada konteks eksternal dan internal di mana kebijakan tersebut diterapkan (Mazmanian & Paul, 1984).

Dalam konteks penanganan stunting, Zhara et al. mencatat bahwa keberhasilan dalam menangani stunting bukan hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada implementasi yang tepat di lapangan (Zhara et al., 2024). Tantangan dalam implementasi kebijakan akan selalu tetap ada. Ditemukan bahwa meskipun banyak kebijakan di tingkat pusat telah dikeluarkan, dampaknya belum sepenuhnya optimal (Saputri & Tumangger, 2019). Studi yang dilakukan oleh Konay et al. menunjukkan bahwa pendekatan top-down yang diterapkan dalam implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif jika birokrasi tidak mematuhi pedoman dan instruksi teknis yang telah ditetapkan oleh regulasi (Konay et al., 2022).

Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Ketika kebijakan dinilai tidak optimal di lapangan, yang ditunjukkan dengan tidak tercapainya tujuan kebijakan, maka selanjutnya penting untuk mencermati penyebab kegagalan kebijakan tersebut. Sarjana terdahulu mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor desain kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, konteks kelembagaan, dan strategi implementasi (Selepe, 2023). Kotnik, et al. (2020) juga mencatat bahwa faktor-faktor strategis yang menjadi penentu yang paling penting dari keberhasilan implementasi kebijakan termasuk kelembagaan, normatif, ekonomi/keuangan, metodologis/prosedural, dan dukungan organisasi/sumber daya manusia/TIK, sementara tantangan seperti praktik evaluasi dan kontinuitas pemerintah juga berdampak pada pelaksanaan. Selain itu, kesiapan untuk implementasi, kepemimpinan, komunikasi kebijakan, dan budaya organisasi (McLoughlin et al., 2021).

Knill & Tosun berpendapat bahwa faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari 6 (enam) faktor, yakni pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial (Knill & Tosun, 2020). Dalam konteks penanganan stunting, implementasi kebijakan penanganan stunting yang efektif dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung (Rahman et al., 2023). Berbagai teori yang ada telah menunjukkan kekhasan dan konteksnya masing-masing. Pemilihan teori ini sebagai pedoman studi dalam pembahasan.

Dalam studi ini, penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Knill & Tosun (2020), menjadi teori sebagai pedoman studi ini terutama dalam pembahasan. Pada dasarnya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor yang saling berinteraksi. Pandangan Knill & Tosun dipilih dengan pertimbangan mencakup substansi kebijakan meliputi instrumen kebijakan; lingkungan kebijakan mencakup desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan; dan para pelaksana kebijakan, yakni kemampuan administratif. Bahkan, juga mencakup penerimaan dari target kebijakan, yakni masyarakat melalui penerimaan sosial. Selain itu, studi terdahulu yang juga menggunakan teori Knill & Tosun yang teridentifikasi menjadikan teori tersebut untuk menganalisis kebijakan berkaitan dengan permasalahan sampah dan transportasi umum (Athallah et al., 2024; Lestari et al., 2024).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, yakni pendekatan yang membedakan dirinya dengan pengakuan terhadap kompleksitas realitas dan keterbatasan dari pemikiran dualistik yang sering kali mendasari pendekatan positivisme klasik (West, 2021). Pendekatan ini lebih bersifat pluralistik, di mana penelitian dikendalikan oleh pertimbangan pragmatis dalam memecahkan masalah dan menghasilkan pengetahuan (Gamlen & McIntyre, 2018). Penggunaan pendekatan ini dilakukan untuk membatasi luasnya penelitian mengenai stunting sehingga studi ini dibingkai menggunakan teori Knill dan Tosun sebagai kerangka kerja untuk melihat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Majene.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan pemerintah, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada petugas di lapangan, meliputi kader posyandu dan kader PKK, serta masyarakat yang memiliki balita. Untuk memperoleh kedalaman data dan memvalidasi informasi yang disampaikan oleh informan, studi ini juga melakukan triangulasi menggunakan studi dokumen, mencakup laporan kinerja perangkat daerah terkait, peraturan perundang-undangan, dan studi terdahulu.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Setelah data dikumpulkan dari berbagai informan, maka dilakukan penyederhanaan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar lebih terfokus dan relevan dengan tujuan studi. Selanjutnya, dilakukan penyajian data dalam bentuk tabel dan gambar sehingga dapat memudahkan dalam pemahaman pembaca. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan dari berbagai analisis yang telah dilakukan melalui interpretasi data yang telah disajikan.

IV. Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan penanganan stunting di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Studi ini

menggunakan kerangka kerja Knill & Tosun (2020) mengenai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan mengenai penurunan stunting di Kabupaten Majene.

Pilihan Instrumen Kebijakan

Pilihan instrumen kebijakan mencakup alat atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Knill dan Tosun (2020), instrumen kebijakan dapat berupa arahan, subsidi, kewenangan, dan informasi. Efektivitas instrumen ini sangat tergantung pada kapasitas pemerintah dan kompleksitas lingkungan kebijakan. Kapasitas pemerintah dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan dan memberikan layanan secara efektif (Tu, 2014) sementara kompleksitas lingkungan kebijakan muncul dari interaksi rumit antara proses sosial dan kendala lingkungan ([Hinterberger et al., 2000](#)).

Instrumen arahan dinilai sesuai pada kondisi ketika kapasitas pemerintah dan kompleksitas lingkungan kebijakan tinggi. Instrumen subsidi akan tepat ketika kompleksitas lingkungan kebijakan tinggi sementara kapasitas pemerintah rendah. Instrumen kewenangan tepat di kondisi kapasitas pemerintah tinggi namun kompleksitas lingkungan kebijakan rendah. Terakhir, instrumen informasi sesuai dengan konteks kapasitas dan kompleksitas lingkungan kebijakan yang sama-sama rendah.

Stunting merupakan masalah yang kompleks. Kondisi ini tampak ketika stunting menjadi masalah yang pada dasarnya sulit didefinisikan dan tidak memiliki solusi yang langsung ([Hoffmann, 2024](#); [Pietrzyk, 2022](#)). Masalah-masalah ini biasanya muncul dalam konteks sosial di mana terdapat banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan yang saling bertentangan, yang mengarah pada beragam perspektif dan evolusi berkelanjutan dari masalah itu sendiri ([Bryant & Arditti, 2018](#); [McKinnon & Long, 2022](#)). Selain itu, masalah tersebut memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, yang memerlukan strategi adaptif dan pengambilan keputusan kolaboratif di antara para pemangku kepentingan ([Meckenstock et al., 2015](#); [Singh & Chakrabarti, 2024](#)).

Sebagai implementor kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam tim penurunan stunting terdiri atas pemerintah, baik di level kebijakan maupun operasional di lapangan, bidan desa, tokoh masyarakat, dan berbagai tenaga ahli. Tim tersebut telah dimuat dalam Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 218/HK/KEP-BUP/III/2022. Selain itu, anggaran penurunan stunting di Kabupaten Majene diatur untuk membiayai berbagai program yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Anggaran Program/Kegiatan Stunting 2023

Program	Anggaran
Rapat Besar Stunting	Rp 21.860.000
Sosialisasi Orang Tua Hebat Dalam Penurunan Stunting	Rp 49.745.800
Program Dapur Sehat Atasi Stunting	Rp 674.623.850
Pemberian makanan tambahan pada keluarga resiko stunting	Rp 4.061.725.000

Sumber: DPA DP3AP2KB (2024)

Kondisi di Kabupaten Majene menunjukkan banyaknya aktor yang terlibat dalam penurunan stunting, baik dari aktor pemerintah maupun non pemerintah. Selain itu, program yang masuk dalam anggaran dan belanja daerah hanya berkaitan dengan sektor kesehatan. Padahal studi terdahulu telah menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah kompleks yang tidak hanya dapat diatasi dari sisi kesehatan namun multi sektor. Berbagai aktor tersebut memiliki target dan sasaran masing-masing sebagaimana telah diatur secara nasional dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Beberapa target dan sasaran tersebut tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Kegiatan dan Target Penurunan Stunting Tahun 2024

No	Kegiatan	Target
1	Rembuk stunting tingkat kecamatan	Minimal 2 kali setiap tahun
2	Jumlah desa bebas stunting	100%

Sumber: Perpres Nomor 72 Tahun 2021

Kegiatan yang diatur secara nasional sebagaimana tampak pada Tabel 2 masih belum mencapai terget. Kenyataan ini dibuktikan ketika di tingkat kecamatan dan desa memang telah dilaksanakan kegiatan rembuk stunting. Namun, pelaksanaan tersebut hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Di Kecamatan Tammeroddo Sendana dan Kecamatan Ulumanda, kegiatan rembuk stunting diselenggarakan pada 31 Mei 2024 ([Beritasulawesi, 2024](#); [Garudapos, 2024](#)). Tidak hanya itu, target 100% harus dicapai berkaitan dengan jumlah desa bebas stunting. Kenyataannya, target tersebut jauh dari harapan. Di Kecamatan Pamboang, prevalensi stunting

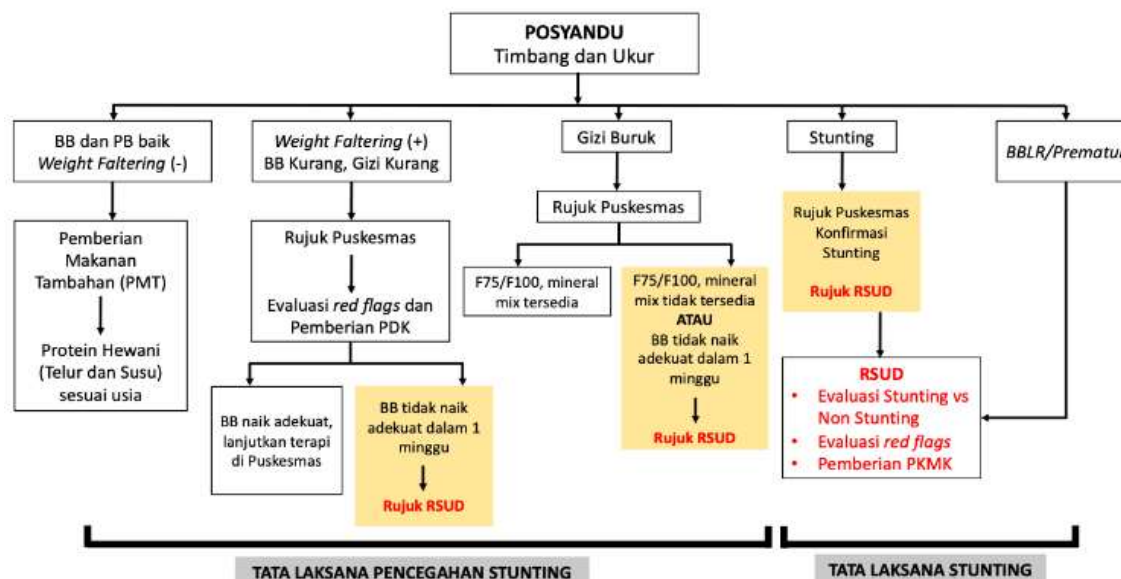
mencapai 42,92% dan diikuti Kecamatan Sendana sebesar 41,08% (Wahab, 2024). Artinya bahwa target bebas stunting di masing-masing desa sebesar 100% tidak tercapai.

Berbagai kenyataan di lapangan menunjukkan instrumen yang tepat untuk menggambarkan kondisi penanganan stunting di Kabupaten Majene adalah instrumen subsidi, dimana kompleksitas lingkungan kebijakan yang tinggi sementara kapasitas pemerintah yang rendah. Instrumen ini ditujukan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat yang memiliki balita untuk hadir di kegiatan posyandu dalam rangka penimbangan tinggi dan pengukuran berat badan. Di samping itu, memotivasi para petugas di lapangan untuk maksimal dalam melaksanakan tugas penurunan stunting. Hal ini juga dilakukan oleh studi terdahulu bahwa subsidi dalam bentuk insentif untuk mendorong keterlibatan dalam kegiatan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja (Muller & Behringer, 2012) dan meningkatkan daya saing (Salant, 1984).

Desain Kebijakan

Desain kebijakan mencakup bagaimana kebijakan itu dirumuskan dan disusun. Proses ini melibatkan analisis masalah, penetapan tujuan, serta pilihan solusi. Kebijakan yang dirancang dengan baik umumnya mempertimbangkan keberagaman pemangku kepentingan dan kebutuhan spesifik dari populasi target. Knill & Tosun (2020) mengungkapkan bahwa desain kebijakan berkaitan dengan kejelasan prosedur, waktu, dan sumber daya, serta perubahan target atau tujuan kebijakan.

Berkaitan dengan prosedur, penanganan stunting terdapat pedoman nasional pelayanan tata kelola stunting sebagaimana tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1 Alur Pencegahan dan Penanganan Stunting

Sumber: Sjarif, 2022 dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting

Berdasarkan Gambar 1, prosedur tata laksana stunting diawali dengan kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan oleh kader posyandu. Ketika ada anak yang tinggi badannya dan berat badannya tidak sesuai, maka anak tersebut diberikan makanan tambahan. Kondisi yang lebih parah ketika stunting disertai dengan penyakit bawaan lainnya, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Adapun standar ukuran tinggi dan berat badan anak yang masuk kategori stunting sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator dan Standar Penentuan Status Gizi

No	Indikator	Status Gizi	Z-Score
1.	BB/U	Gizi Buruk	<-3SD
		Gizi Kurang	-3 SD s/d <-2 SD
		Gizi Baik	-2SD s/d 2SD
		Gizi Lebih	> 2SD
2.	TB/U	Sangat Pendek	<-3SD
		Pendek	-3 SD s/d <-2 SD
		Normal	>= -2SD
3.	BB/TB	Sangat Kurus	<-3SD
		Kurus	-3 SD s/d <-2 SD
		Normal	-2SD s/d 2SD
		Gemuk	> 2SD

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Kegiatan pengukuran dan penimbangan balita dilakukan setiap bulan sementara bulan penimbangan balita ditetapkan setiap bulan Februari dan Agustus. Dilihat dari kehadiran pada kegiatan posyandu pada Agustus 2023, tidak semua balita hadir dan yang ditimbang ternyata tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Target dan Realisasi Jumlah Balita pada Bulan Agustus 2023

No	Kecamatan	Target	Ditimbang
1.	Banggae I	1697	564
2.	Totoli	2128	1151
3.	Banggae II	992	602
4.	Lembang	1366	800
5.	Pamboang	2359	1566
6.	Sendana I	2298	1483
7.	Tammeroddo	1159	478
8.	Sendana II	959	568
9.	Malunda	2198	1091
10.	Ulumanda	730	301
11.	Salutambung	372	230
	Jumlah	16264	8834

Sumber: Dinas Kesehatan (2024)

Berkaitan dengan sumber daya, anggaran stunting telah diuraikan sebagaimana Tabel 1 hanya bersumber dari anggaran daerah. Ketidakpastian sumber daya ini akan berimplikasi pada pelaksanaan program dan kegiatan penurunan stunting. Ketika terjadi efisiensi, maka akan sulit untuk melaksanakan program tersebut dengan optimal. Kondisi ini juga menjadi temuan studi terdahulu mengenai pentingnya anggaran dan kapasitas fiskal dalam mengurangi stunting ([Shekar et al., 2017](#); [Suharsih & Rahayu, 2023](#)).

Berkaitan dengan target dan perubahan tujuannya dari desain awal kebijakan terlihat ketika kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene yang tahun 2024 prevalensi stunting ditargetkan sebesar 20,79%. Namun, kenyataannya, prevalensi stunting pada Juni 2024 mencapai 36,47%, meningkat 1% dari tahun sebelumnya (Taufik, 2024). Artinya bahwa target awal kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene tidak tercapai, bahkan mencapai 5.507 kasus stunting ([Amjad et al., 2025](#)).

Struktur Pengawasan

Struktur pengawasan berfungsi untuk memastikan kebijakan diimplementasikan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan di awal. Struktur ini mencakup mekanisme kontrol dan

evaluasi yang dirancang untuk menilai efektivitas kebijakan. Knill dan Tosun (2020) mengemukakan bahwa struktur pengawasan yang kuat akan memperbaiki akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kebijakan. Indikator dalam struktur pengawasan ini mencakup pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas secara formal dan informal oleh masyarakat.

Pengawasan di lapangan dilakukan oleh kader posyandu melalui kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita. Adapun oleh badan pengawas secara formal mengacu pada instansi yang memiliki tugas dan fungsi berkenaan dengan pengawasan. Inspektorat Kabupaten, yakni perangkat daerah kabupaten bertugas di bidang pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten. Tugas lembaga tersebut telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 berkenaan dengan membantu Bupati dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam konteks penanganan stunting, penanganan stunting berkaitan dengan urusan kependudukan sehingga inspektorat daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan tersebut, mulai dari memastikan bahwa penggunaan anggaran penurunan stunting, pelaksanaan program, dan aktivitas penanganan stunting di Kabupaten Majene dilaksanakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan pengawasan lainnya, yakni Badan Pengawas Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas di bidang pengawasan terhadap pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Dalam konteks penanganan stunting, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam konteks implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Majene tidak optimal. Kondisi ini dibuktikan ketika adanya kasus berkaitan dengan penyalahgunaan dana penanganan stunting sebesar 5 miliar (Ardi, 2024).

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan terkait dengan kerangka organisasi yang mengelola pelaksanaan kebijakan. Keterkaitan antar lembaga dan kecukupan kapasitas institusi menjadi sangat penting dalam memastikan implementasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Knill dan Tosun (2020) menekankan bahwa desain kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi. Desain kelembagaan dilihat dari banyaknya organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta koordinasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Organisasi yang tergabung dalam penurunan stunting telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Majene Nomor 218/HK/KEP-BUP/III/2022, yang terdiri atas organisasi pemerintah, yakni Sekretariat Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; serta Dinas Sosial. Selain itu, organisasi di tingkat kecamatan dan desa, meliputi Camat; Kepala Desa/Lurah; bidan desa, puskesmas, tenaga ahli, dan para kader.

Koordinasi dalam konteks penurunan stunting di Kabupaten Majene dilakukan melalui kegiatan rembuk stunting maupun rapat evaluasi kegiatan. Koordinasi juga dilakukan melalui grup whatsapp dalam bentuk penyampaian laporan kegiatan penimbangan dan pengukuran balita. Kegiatan rembuk stunting di Kabupaten Majene dilaksanakan pada 28 Mei 2024 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Passarang, yang dihadiri oleh kepala perangkat daerah, para camat, lurah, dan kepala desa ([Setda, 2024](#)). Kondisi ini menggambarkan bahwa koordinasi yang berlangsung selama ini masih internal pemerintah. Padahal kenyataannya, dibutuhkan keterlibatan aktor di luar pemerintah dalam penurunan stunting.

Kebutuhan ini juga dikemukakan oleh studi terdahulu bahwa pemerintah, industri, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan media menjadi aktor penting dalam mengurangi stunting ([Mustari et al., 2024](#)), selain itu, dokter, perawat, bidan, ahli gizi, dan sanitaris juga menjadi aktor interprofesional ([Astuti et al., 2021](#)), serta petugas di lapangan mencakup kader posyandu, PKK, dan masyarakat ([Subekti et al., 2023](#)). Kebutuhan ini dinilai karena intervensi sensitif, yakni penanganan stunting yang berfokus pada penyebab tidak langsung stunting, dilakukan oleh berbagai aktor dan sektor yang berkontribusi sebanyak 70% dalam mengatasi stunting ([Khasanah et al., 2022](#)), sehingga diperlukan koordinasi antar aktor dalam pencapaian target penurunan stunting.

Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif mencakup kemampuan pemerintah dan lembaga terkait dalam menjalankan dan mengelola kebijakan secara efektif. Kemampuan ini melibatkan sumber daya manusia, anggaran, dan kompetensi teknis. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah kekurangan kapasitas yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan birokrasi yang efisien dan kompeten memiliki tingkat keberhasilan implementasi kebijakan yang lebih tinggi. Knill & Tosun (2020) mengungkapkan beberapa indikator yang menentukan keberhasilan implementasi yang berkaitan dengan kemampuan

administratif adalah ketersediaan dan kecukupan sumber daya organisasi meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi informasi pendukung serta kemampuan pelaksana dalam melaksanakan SOP.

Dilihat dari kondisi sumber daya manusia, penanganan stunting di tingkat kabupaten yang diatur dalam Keputusan Bupati Majene tergabung dalam tim penurunan stunting mengacu pada tugas dan fungsi di masing-masing organisasi perangkat daerah. Adapun tenaga operasional di lapangan telah di atur dalam Keputusan Camat dan Kepala Desa. Berkaitan dengan sumber daya keuangan, terdapat beberapa program dan alokasi anggaran yang ditetapkan berkaitan dengan pencegahan stunting sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Program dan Alokasi Anggaran Pencegahan Stunting

Program	Anggaran
Pelayanan Kesehatan	Rp. 28,6 miliar
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 189,7 juta
Program Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 204 juta

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majene (2023)

Sebagai salah bentuk bentuk komitmen pemerintah dalam penanganan stunting, Tabel 5 menunjukkan bahwa telah tersedianya anggaran penanganan stunting di Kabupaten Majene. Namun, dilihat dari kecukupannya, sumber daya keuangan tersebut tidak cukup. Hal ini mengacu pada tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Majene yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, anggaran yang berasal dari DAU juga digunakan untuk penanganan stunting sebesar 5 miliar rupiah, yang terbagi atas bantuan pangan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta makanan tambahan bagi keluarga berisiko. Kenyataannya, penggunaan anggaran tersebut tidak mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 ([Ardi, 2024](#)).

Berkenaan dengan SOP, sejak 2023, pemerintah Kabupaten Majene telah membuat SOP tentang penanganan stunting yang melibatkan berbagai aktor pelaksana. SOP berperan dalam penanganan stunting yang efektif karena memuat siapa melakukan apa bersama siapa, kapan pelaksanaannya, serta biaya dan kelengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut. Artinya bahwa ada pembagian tugas yang dimuat dalam SOP penanganan stunting di lapangan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kader posyandu dan kader PKK memiliki tugas berkaitan dengan pemberian PMT bagi balita yang berpotensi stunting. Namun, kondisi di

lapangan ditemukan bahwa pemberian PMT langsung diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanpa melibatkan petugas di lapangan. Hal ini berimplikasi pada ketidakmampuan pelaksana dalam melaksanakan SOP yang ditetapkan.

Penerimaan Sosial

Penerimaan sosial mencakup dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Knill dan Tosun (2020) menyatakan bahwa tanpa dukungan masyarakat, bahkan kebijakan yang paling efektif sekalipun dapat gagal. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakana untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut disosialisasikan dengan baik agar dapat diterima oleh masyarakat.

Dilihat dari kemanfaatan program penanganan stunting yang dirasakan oleh masyarakat, meskipun prevalensi stunting di Kabupaten Majene masih tinggi. Namun, pemerintah telah berupaya dalam mengatasi masalah yang dianggap kompleks ini. Dari berbagai upaya tersebut, meliputi kegiatan sosialisasi, pemberdayaan bagi masyarakat, dan kegiatan loka karya mini di tingkat kecamatan. Selain itu, manfaat yang juga dirasakan dengan adanya program rumah pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang di dalamnya termasuk kegiatan edukasi mengenai pola makan bagi ibu hamil.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam penurunan stunting masih rendah. Kenyataan ini dilihat dari persentase keterlibatan masyarakat yang memiliki balita untuk berpartisipasi dalam kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan di posyandu. Padahal, kegiatan tersebut merupakan awal dari pencegahan stunting. Hal ini juga disampaikan pada studi terdahulu bahwa proses penimbangan dan pengukuran tinggi badan di posyandu memungkinkan identifikasi awal terhadap anak-anak yang berisiko stunting sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat waktu (Ramadhan et al., 2022; Syagata et al., 2021). Data di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut masih berada pada 54,32% balita yang tercatat dan diukur pada bulan perimbangan balita Agustus 2023.

V. Kesimpulan

Kegagalan implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Majene terlihat pada prevalensi stunting yang sangat dinamis. Kondisi tersebut memotivasi studi ini untuk mengkaji penentu keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting. Studi ini menemukan bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene ditentukan oleh ketersediaan subsidi; kejelasan prosedur, kecukupan sumber daya dan penentuan target yang faktual; optimalitas pengawasan; intensitas koordinasi organisasi yang terlibat dalam forum formal dan informal; ketepatan pemanfaatan sumber daya; kejelasan kemanfaatan program bagi masyarakat.

Keterbatasan studi ini adalah informan yang tidak mencakup semua aktor yang terlibat dalam tim penurunan stunting terutama aktor non pemerintah. Rekomendasi ke depan, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang melibatkan semua aktor dan evaluasi secara berkala mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting.

VI. References

- Ali, A. R. (2025). Blunder Gerakan Penurunan Stunting di Sulawesi Barat. *Kompasiana.Com*. <https://www.kompasiana.com/ucangali50/6807490ac925c439334965f2/blunder-gerakan-penurunan-stunting-di-sulawesi-barat>
- Amjad, M., Yusriani, Y., & Mahmud, N. U. (2025). Relationship between Knowledge and Efforts of Posyandu Cadres in Preventing Stunting through Social Media in Toddlers at Puskesmas Banggae I Majene Regency. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 6(1), 272–276.
- Ardi. (2024). Kejati Sulbar Diminta Selidiki Dugaan Mark up Dana Penanganan Stunting di Majene. *Kilassulbar.Id*. <https://kilassulbar.id/kejati-sulbar-diminta-selidiki-dugaan-mark-up-dana-penanganan-stunting-di-majene/>
- Ariantjelangi, L. (2020). Clean and healthy living behavior with the stunting events in children in central Java, Indonesia. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(12), 127–133. <https://doi.org/10.31838/srp.2020.12.21>
- Astuti, A. B., Mulyanti, S., & Diyono, . (2021). The Effectiveness of the Interprofessional Collaboration (IPC) Program on The Attitude of Mothers and Health Cadres on Stunting at Puskesmas Karangnom Klaten Central Java Republic of Indonesia. *Electronic Journal of General Medicine*, 18(6), em328. <https://doi.org/10.29333/ejgm/11315>
- Athallah, A. L. D., Hamdi, M., & Rahmah, M. (2024). Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(2), 43–60.
- Beritasulawesi. (2024, May 31). Kolaborasi Lintas Sektor untuk Penurunan Stunting, Bhabinkamtibmas Desa Salutambung Hadiri Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan Ulumanda. *Beritasulawesi.Id*. <https://beritasulawesi.id/kolaborasi-lintas-sektor-untuk-penurunan-stunting-bhabinkamtibmas-desa-salutambung-hadiri-rembuk-stunting-tingkat-kecamatan-ulumanda/>
- Bhutta, Z. A., Akseer, N., Keats, E. C., Vaivada, T., Baker, S. K., Horton, S., Katz, J., Menon, P., Piwoz, E., Shekar, M., Victora, C. G., & Black, R. E. (2020). How Countries Can Reduce

- Child Stunting at Scale: Lessons From Exemplar Countries. *American Journal of Clinical Nutrition*, 112, 894S-904S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa153>
- Bryant, R., & Arditti, R. C. (2018). 'A Wicked Problem'? Risk Assessment and Decision-Making When Licensing Possession and Use of Firearms in Greater London. *The Police Journal Theory Practice and Principles*, 92(3), 203–220. <https://doi.org/10.1177/0032258x18797992>
- Candarmaweni, & Rahayu, A. Y. S. (2020). Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from Pandeglang. *E3S Web of Conferences*, 211, 01014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101014>
- Ekayanthi, N. W. D., & Suryani, P. (2019). Edukasi Gizi Pada Ibu Hamil Mencegah Stunting Pada Kelas Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan*, 10(3), 312–319. <https://doi.org/10.26630/jk.v10i3.1389>
- Elisaria, E., Mrema, J., Bogale, T., Segafredo, G., & Festo, C. (2021). Effectiveness of Integrated Nutrition Interventions on Childhood Stunting: A Quasi-Experimental Evaluation Design. *BMC Nutrition*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40795-021-00421-7>
- Gamlen, A., & McIntyre, C. (2018). Mixing Methods to Explain Emigration Policies: A Post-Positivist Perspective. *Journal of Mixed Methods Research*, 12(4), 374–393. <https://doi.org/10.1177/1558689818782822>
- Garudapos. (2024). Pelaksanaan Rembuk Stunting Tahun 2024, Kecamatan Tammeroddo Sendana. *Garudapos.Id*. <https://garudapos.id/2024/05/31/pelaksanaan-rembuk-stunting-tahun-2024-kecamatan-tammeroddo-sendana/>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan publik: Proses, analisis, dan partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Hinterberger, F., Luks, F., Stewen, M., & der van Straaten, J. (2000). Environmental policy in a complex world. *International Journal of Sustainable Development*, 3(3), 276–296. <https://doi.org/10.1504/IJSD.2000.001536>
- Hisanuddin, S. L. O. S. I., Andriani, R., Sos, S., & ... (2023). *Konvergensi Kebijakan Penanggulangan Stunting*. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2eTMEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kolaborasi%7C%22tata+kelola+kolaboratif%22%7C%22collaborative+governance%22+stunting&ots=vrNvCmh0z5&sig=-C2V5fzl5_-YnJoQT3goHY_dnHw](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2eTMEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kolaborasi%7C%22tata+kelola+kolaboratif%22%7C%22collaborative+governance%22+stunting&ots=vrNvCmh0z5&sig=-C2V5fzl5_-YnJoQT3goHY_dnHw)
- Hoffmann, M. H. G. (2024). Learning to Engage With Wicked Problems in Teams. *Journal of Didactics of Philosophy*, 8. <https://doi.org/10.46586/jdph.2024.11216>
- Indriyani, I. N., Ibrahim, & Sarpin. (2022). Implementation the policy of prevention and stunting management (Study of Regional Regulation Number 7 of 2021 Concerning Prevention and Stunting Management in South Bangka). *Social Science Studies*, 2(6), 487–509. <https://doi.org/10.47153/sss26.4772022>
- Kemenkes. (2021). *Buku saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota tahun 2021*.
- Kemenkes. (2022). *Buku saku hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/09fb5b8ccfd0f88080f2521ff0b4374f.pdf>

- Kemenkes. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dalam Angka*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022. *Kemenkes RI*, 1–14.
- Khasanah, U., Esyuananik, E., Laili, A. N., & Saadah, N. (2022). The effect of sensitive interventions on stunting reduction efforts. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 10(3), 274–282. <https://doi.org/10.20473/jbe.V10I32022.274-282>
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy: A new introduction*. Bloomsbury Publishing.
- Konay, D. R., Pandie, D. B. W., & Djani, W. (2022). Policy Implementation Of Stunting Prevention In Kupang Tengah District, Kupang Regency. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 3(2), 147–157. <https://doi.org/10.38142/jtep.v3i2.639>
- Kotnik, Ž., Umek, L., Kovač, P., Stanimirovic, D., & Vintar, M. (2020). Analysis of the Key Factors for Successful Public Policy Implementation: A Qualitative Study in Slovenia. *Danube*, 11(2), 113–140. <https://doi.org/10.2478/DANB-2020-0007>
- Kurniati, H., Djuwita, R., & Istiqfani, M. (2023). Literature Review: Stunting Saat Balita Sebagai Salah Satu Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Di Masa Depan. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.7454/epidkes.v6i2.6349>
- Lestari, S. F. I., Hamdi, M., & Rahmah, M. (2024). Jalan Bermakna Pemecahan Masalah: Mengelola Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Trans Metro Bandung di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2), 136–153. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i2.4539>
- Maya, S. (2023). PKM Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. *Al-Ijtima Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 117–126. <https://doi.org/10.53515/aijpkm.v4i1.87>
- Mazmanian, D. A., & Paul, S. (1984). Implementation and Public Policy. *Land Contamination & Reclamation*, 14(4), 159. <https://doi.org/10.2307/3330197>
- McKinnon, M. N., & Long, B. S. (2022). Leading With Two Eyes: Leadership Failures and Possibilities in the Management of a Pulp Mill's Wicked Problem. *Qualitative Research in Organizations and Management an International Journal*, 17(3), 318–339. <https://doi.org/10.1108/qrom-01-2022-2278>
- McLoughlin, G. M., Allen, P., Walsh-Bailey, C., & Brownson, R. C. (2021). *A systematic review of school health policy measurement tools: implementation determinants and outcomes*. 2(1), 67. <https://doi.org/10.1186/S43058-021-00169-Y>
- Meckenstock, J., Barbosa-Póvoa, A. P., & Carvalho, A. (2015). The Wicked Character of Sustainable Supply Chain Management: Evidence From Sustainability Reports. *Business Strategy and the Environment*, 25(7), 449–477. <https://doi.org/10.1002/bse.1872>
- Melisa, M., Kasmawati, K., Sitompul, S. A. F. P., Monalisa, M., Monalisa, R., & Novianti, M. N. (2022). The Government Policy for Stunting Countermeasure Strategy in Indonesia Be Preparing for Golden Generation 2045. *Scholars International Journal of Law Crime and Justice*, 5(12), 554–563. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i12.006>

- Metasari, A. R., Sumarni, S., & Kamsiar, K. (2024). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting (Status Ekonomi Dan Pemberian Asi Eksklusif) Pada Balita Usia 25-59 Bulan. *Blantika Multidisciplinary Journal*, 2(5), 463–471. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.131>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Milwan, M., & Sunarya, A. (2023). Stunting Reduction in Indonesia: Challenges and Opportunities. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(7), 2223–2231. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180727>
- Muller, N., & Behringer, F. (2012). Subsidies and Levies as Policy Instruments to Encourage Employer-Provided Training. *Research Papers in Economics*. <https://doi.org/10.1787/5K97B083V1VB-EN>
- Mustafidah, L., Ayu, J. P., I.V., I., Kodriyah, L., & Zudi, M. (2024). Implementation of Stunting Management Policy by Guntur 1 Public Health Center, Demak Regency. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 14(7), 275–279. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.14.07.2024.p15132>
- Mustari, N., Wahid, N., . M., . H., Arfah, I. N., & Chandra, D. (2024). Quadruple and Quintuple Helix Innovation: A Multi-Actor Approach in Reducing the Prevalence of Stunting at Jeneponto Regency, Indonesia. *South Eastern European Journal of Public Health*, 1380–1394. <https://doi.org/10.70135/seejph.vi.2466>
- Mustika, S., Khairunnisa, C., & Mardiaty, M. (2022). Prevalensi Stunting Pada Siswa SMP Negeri 7 Lhokseumawe. *Galenical Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 1(4), 63. <https://doi.org/10.29103/jkkmm.v1i4.8907>
- Nababan, D. (2015). Mother and Child Nutrition; (A Review of Stunting Studies). *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 22(1), 13–20. <http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=3840>
- Nugroho, H. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Tamansari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. *Public Policy and Management Inquiry*, 7(1), 651. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2023.7.1.6792>
- Nugroho, M. R., Armeidi, E., & Mahyuddin, M. (2023). Analysis of Indonesia's Nutritional Status Survey Results 2021–2022: Trend of Stunting Prevalence Rates in the Provinces of South Sumatera and Bengkulu Towards a National Target of 14% in 2024. *Indonesian Journal of Health Research and Development*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.58723/ijhrd.v1i1.26>
- Onyango, G. (2022). *Policy-Visibility and Implementation in Public Administration*. 9557–9564. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_3867
- Osendarp, S., Akuoku, J. K., Black, R. E., Headey, D., Ruel, M. T., Scott, N., Shekar, M., Walker, N., Flory, A., Haddad, L., Laborde, D., Stegmuller, A., Thomas, M., & Heidkamp, R. (2021). The COVID-19 Crisis Will Exacerbate Maternal and Child Undernutrition and Child Mortality in Low- And Middle-Income Countries. *Nature Food*, 2(7), 476–484.

<https://doi.org/10.1038/s43016-021-00319-4>

Pietrzyk, K. (2022). Wicked Problems in Architectural Research: The Role of Research by Design. *Arena Journal of Architectural Research*, 7(1). <https://doi.org/10.5334/ajar.296>

Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VIII(01), 44–59.

Rahmawati, R., Dewi, I., & ... (2023). Implementasi Pemberian Edukasi Dengan Media Booklet Stunting Terhadap Peningkatan Pengetahuan Kader Di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Marusu. *JIMPK: Jurnal Ilmiah*
<https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jimpk/article/view/1285>

Ramadhan, K., Entoh, C., & Nurfatimah, N. (2022). Peran Kader Dalam Penurunan Stunting Di Desa. *Jurnal Bidan Cerdas*, 4(1), 53–61. <https://doi.org/10.33860/jbc.v4i1.409>

Salant, S. W. (1984). *Export Subsidies as Instruments of Economic and Foreign Policy*. <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/notes/2007/N2120.pdf>

Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>

Sari, D. P., & Yusran, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Journal of Civic Education*, 5(1), 90–100. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i1.661>

Selepe, M. M. (2023). The evaluation of public policy implementation failures and possible solutions. *Eureka: Social and Humanities*, 1, 43–53. <https://doi.org/10.21303/2504-5571.2023.002736>

Setda. (2024). Rembuk Stunting. *Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Majene*.

Setkab. (2023, January 17). Presiden Minta Pemda Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem. *Setkab.Go.Id*. <https://setkab.go.id/presiden-minta-pemda-turunkan-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem/>

Setneg. (2025). Prevalensi Stunting Indonesia Turun ke 19,8%. *Stunting.Go.Id*. <https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/#:~:text=Hasil SSGI menunjukkan bahwa prevalensi,yaitu 20%2C1%25%2C>

Shekar, M., Kakietek, J., D'Alimonte, M. R., Rogers, H. E., Eberwein, J. D., Akuoku, J. K., Pereira, A., Soe-Lin, S., & Hecht, R. (2017). Reaching the global target to reduce stunting: an investment framework. *Health Policy and Planning*, 32(5), 657–668. <https://doi.org/10.1093/heapol/czw184>

Singh, S. K., & Chakrabarti, A. (2024). Assessment of Structuredness of Problems in Design. *Proceedings of the Design Society*, 4, 1085–1094. <https://doi.org/10.1017/pds.2024.111>

Sitorus, N. L. (2024). The Significance of Tackling Stunting for The Economic Prosperity of A Nation – A Narrative Review. *Journal of Indonesian Specialized Nutrition*, 1(4), 131–137. <https://doi.org/10.46799/jisn.v1i4.23>

Subekti, T., Nimas Mayang Sabrina, Indra Waluyhadi, Dodik Prasetyo, & Eko Sulkhani. (2023).

- Collaborative action dalam upaya pencegahan stunting di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. *Wisesa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 18–23. <https://doi.org/10.21776/ub.wisesa.2023.02.2.4>
- Suharsih, S., & Rahayu, A. (2023). Relationship between budget policy, fiscal capacity and stunting prevalence in Indonesia. *International Journal of Advanced Economics*, 5(7), 187–198. <https://doi.org/10.51594/ijae.v5i7.551>
- Sunarni, N., Rizqiyani, A. T., & Maita, L. (2022). Literature Review: The Recent Midwifery Interventions Improving Public Attitudes and Knowledge in Stunting Prevention. *Genius Midwifery Journal*, 1(1), 7–16. <https://doi.org/10.56359/genmj.v1i1.98>
- Syafrawati, S., Lipoeto, N. I., Masrul, M., Novianti, N., Gusnedi, G., Susilowati, A., Nurdin, A., Purnakarya, I., Andrafikar, A., & Umar, H. B. (2023). Factors driving and inhibiting stunting reduction acceleration programs at district level: A qualitative study in West Sumatra. *PLoS ONE*, 18(3 MARCH), 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283739>
- Syagata, A. S., Rohmah, F. N., Khairani, K., & Arifah, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Tinggi Badan Oleh Kader Posyandu Di Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah*, 17(2), 195–203. <https://doi.org/10.31101/jkk.2311>
- Taofik, J., Samudra, A. A., & Satispi, E. (2024). Implementation of Stunting Reduction Regulations And Policies in East Lombok Regency, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), e3233. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3233>
- Taufik, M. R. H. (2024, July 12). Prevalensi Stunting Tinggi di Majene: Langkah Preventif Dinkes. *Rri.Co.Id*. <https://www.rri.co.id/sulawesi-barat/kesehatan/822901/prevalensi-stunting-tinggi-di-majene-langkah-preventif-dinkes>
- Tu, X. (2014). *Local Government Capacity and Citizen Co-production: A Review of Theory and Evidence*. 2013(4), 103–131. <https://doi.org/10.2478/SCS-2014-0163>
- Wahab, A. (2024, July 11). Anak Stunting di Majene Paling Banyak di Pamboang, Capai 42,92 Persen. *Https://Sulbar.Tribunnews.Com/*. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/07/11/anak-stunting-di-majene-paling-banyak-di-pamboang-capai-4292-persen>
- Wand, H., Naidoo, S., Govender, V., Reddy, T., & Moodley, J. (2024). Preventing Stunting in South African Children Under 5: Evaluating the Combined Impacts of Maternal Characteristics and Low Socioeconomic Conditions. *Journal of Prevention*, 45(3), 339–355. <https://doi.org/10.1007/s10935-024-00766-2>
- West, J. (2021). Pre-Service Teachers' Attitudes and Ethnocentrism Regarding Language-in-Education Issues. *Journal for Language Teaching*, 55(1), 175–201. <https://doi.org/10.4314/jlt.v55i1.8>
- WHO. (2015). *Stunting in a nutshell*. Who.Int. <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>
- Widhiastuti, R., HR, M., & Trisnadi, S. (2021). Reconstruction of Prevention and Handling of Stunting Policy in Public Health Center. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(2), 3292–3296. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i2.14874>

Zhara, T. M., Weston, A. D., & Fitrie, R. A. (2024). *Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Penanganan Stunting Dalam Menanggulangi Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Nganjuk*. 1(2), 19. <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2395>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).